

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.GS/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh:

Christel Lasmana, Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suhan Jagara** dan **Adek Gupal Putra**, Keduanya Karyawan PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Sijunjung beralamat di Jl. Imam Bonjol Jorong Pasar Ilie Pasar Jumat Nagari Muaro Sijunjung, Sumatera Barat No. Telepon: 0754-2093, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2022, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 6/K.Kh/2022/PA.SJJ, tanggal 05 April 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Desmeri binti Jurdin, tempat dan tanggal lahir: Pondok Jago, 02 November 1979, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Kaki Lima, Pendidikan -, Tempat kediaman di Kel. Pematang Panjang Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 09 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 4/Pdt.GS/2022/PA.SJJ, pada tanggal 05 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan: Ingkar janji/Wanprestasi;
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? Akad Murabahah No. 542019110042M, yang dibuat pada hari Jumat, 29 November 2019;
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? Perjanjian/Akad Tertulis;
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Yang diperjanjikan dalam Akad Murabahah adalah:

- a. Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type ALL NEW SCOOPY STYLISH, No. Rangka MH1JM313XKK078399 No. Mesin JM31E3073106 dan No. Polisi BA 6406 KC; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp.18.755.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 35 (Tiga Puluh Lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp.831.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 02 (Dua) setiap bulannya sampai dengan lunas;
- b. Selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka:
 - 1) Kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya;
 - 2) Tergugat dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan dengan cara bagaimanapun kendaraan tersebut kepada orang atau Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat (Pasal 5 Akad);

3) Apabila Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Akad, maka Penggugat berhak melakukan penarikan Kendaraan tersebut dari pihak manapun yang menguasai kendaraan dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menjual kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Tergugat (Pasal 8 Akad);

5. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah di mana sejak tanggal 02 November 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:

- a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 02 November 2021 No. SPKNS542020211102002-1;
- b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 16 November 2021 No. SPKNS54202021111600231-2;
- c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 13 Desember 2021 No. SPKNS5420202112130040-3;

5. Berapa kerugian yang anda derita?

Rp.18.135.405,- (Delapan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Rupiah), yang terdiri dari:

RINCIAN KERUGIAN		
1)	Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok	Rp. 10.685.873
2)	Sisa Margin keuntungan	Rp. 2.610.127
3)	Denda (Ta'jir)	Rp. 1.890.525
4)	Biaya transportasi Sidang Gugatan ini 4 x Rp. 150.000	Rp. 150.000
5)	Biaya Legalisasi Bukti (Sertifikat Fidusia)	Rp. 350.000
6)	Biaya Administrasi	Rp. 1.208.880
7)	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 1.240.000

6. **Uraian lainnya:**

PERMOHONAN SITA JAMINAN

- a. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah di mana dalam Akad tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut Margin Keuntungan dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya;
- b. Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama Tergugat masih berada dalam penguasaan Penggugat dan atas jaminan tersebut juga sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00089525.AH.05.01 TAHUN 2021. Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah: 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type ALL NEW SCOOPY STYLISH, No. Rangka MH1JM313XKK078399, No. Mesin JM31E3073106, No. Polisi BA 6406 KC, BPKB atas nama Desmeri;
- c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut;
- d. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat dan sudah ada juga Sertifikat Fidusianya, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk

memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan;

- e. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan: *“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”*

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Akad Murabahah No. 542019110042M tanggal 29 November 2019.
Keterangan Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah singkat : menandatangani Akad Murabahah. Dalam Akad tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.
2. BPKB Nomor P05655027 atas nama Desmeri (Tergugat) yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.
Keterangan Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai singkat: jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
3. Surat Somasi/Peringatan.
 - a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 02 November 2021 No. SPKNS542020211102002-1;

- b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 16 November 2021 No. SPKNS54202021111600231-2;
- c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 13 Desember 2021 No. SPKNS5420202112130040-3;

Keterangan Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan singkat: Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

- 4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00089525.AH.05.01 TAHUN 2021

Keterangan Bukti ini membuktikan bahwa secara hukum Kendaraan singkat : sudah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat sekaligus telah memberikan kekuatan hak eksekutorial langsung (parate eksekusi) apabila Tergugat melakukan pelanggaran dalam perjanjian.

Saksi:

Rayunda Sempurna (Kolektor PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Sijunjung)

Keterangan Benar saksi sebagai karyawan Penggugat yang melakukan singkat: penagihan angsuran kepada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
- 3. Dalam Permohonan SITA:

- a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type ALL NEW SCOOPY STYLISH, No. Rangka MH1JM313XKK078399, No. Mesin JM31E3073106, No. Polisi BA 6406 KC, BPKB atas nama Desmeri;
 - b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp.18.135.405,- (Delapan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Rupiah);
 5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type ALL NEW SCOOPY STYLISH, No. Rangka MH1JM313XKK078399, No. Mesin JM31E3073106, No. Polisi BA 6406 KC, BPKB atas nama Desmeri, apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
 6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type ALL NEW SCOOPY STYLISH, No. Rangka MH1JM313XKK078399, No. Mesin JM31E3073106, No. Polisi BA 6406 KC, BPKB atas nama Desmeri, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;
 7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type ALL NEW SCOOPY STYLISH, No. Rangka MH1JM313XKK078399, No. Mesin JM31E3073106, No. Polisi BA 6406 KC, BPKB atas nama Desmeri, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;
 8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan

ini;

9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat telah datang ke persidangan, sedangkan Tegugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Hakim menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan dimaksud, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Deseri (Tergugat), NIK 1303044211840001, dikeluarkan pada tanggal 31-10-2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang materinya Tergugat adalah penduduk Kabupaten Sijunjung, yang telah dinazegellen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Deseri (Tergugat), Nomor 1303043010180002, dikeluarkan pada tanggal 30-10-2018, oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang materinya Deseri sebagai Kepala Keluarga dengan status cerai hidup, yang telah dinazegellen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotokopi Akad Murabahah An. Suhan Jagara (Penggugat/Pimpinan Cabang) dan Deseri (Tergugat/Konsumen), Nomor 542019110042M, dibuat pada tanggal 29-11-2019, yang materinya Penggugat telah melakukan pembiayaan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type ALL NEW SCOOPY STYLISH, No. Rangka MH1JM313XKK078399 No. Mesin JM31E3073106 dan No. Polisi BA 6406 KC, dan Tergugat telah menerima kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tetap berada pada Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya, yang telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) An. Deseri (Tergugat), P-05655027, dikeluarkan pada tanggal 04-12-2019, oleh Polda Sumatera Barat, yang materinya 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type ALL NEW SCOOPY STYLISH, No. Rangka MH1JM313XKK078399 No. Mesin JM31E3073106 dan No. Polisi BA 6406 KC, BPKB atas nama Desmeri, yang telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi 3 (tiga) Surat Somasi/Peringatan yang dibuat oleh Penggugat dan ditujukan kepada Tergugat, yaitu:
 - a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 02 November 2021 No. SPKNS542020211102002-1;
 - b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 16 November 2021 No. SPKNS54202021111600231-2;
 - c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 13 Desember 2021 No. SPKNS5420202112130040-3;

yang materinya Tergugat (Deseri) sudah 3 (tiga) kali diberikan peringatan/somasi agar melunasi angsuran ke-19 sampai ke-21, namun Tergugat tidak melunasinya, yang telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **P-5**;

Bukti Keterangan Saksi:

1. **Rayunda Sampurna bin Syamsudin**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adalah karyawan PT. Mandala Multifinance, dengan jabatan sebagai kolektor (penagih);
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi memegang data Tergugat sebagai konsumen dalam akad murabahah jual beli kendaraan (motor) pada perusahaan PT.Mandala Multifinance, Tbk bulan Agustus 2021;
 - Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Tergugat pada saat Tergugat telat membayar angsuran yaitu bulan Agustus 2021;
 - Bahwa kurang mengetahui tentang isi akad tersebut, yang saksi ketahui angsuran Tergugat sejumlah Rp.831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) per bulannya;
 - Bahwa pada awalnya pembayaran angsuran Tergugat berjalan lancar, tetapi kemudian angsuran Tergugat macet, lalu saksi diperintahkan untuk mengantar surat peringatan pertama kepada Tergugat, tetapi sebelum mengantar surat peringatan itu saksi pernah bertemu Tergugat dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menunggu uang untuk angsuran itu dari ponakannya karena kendaraan itu ponakannya yang memakainya, namun saksi tidak pernah bertemu dengan ponakan Tergugat itu;
 - Bahwa saksi diperintahkan mengantar surat peringatan pertama kepada Tergugat pada tanggal 2 November 2021, pada saat itu saksi bertemu Tergugat saat itu, Tergugat berjanji akan membayar dalam waktu seminggu ke depan, namun tidak dibayar;

- Bahwa saksi diperintahkan mengantar surat peringatan kedua ke tempat Tergugat, saat itu saksi bertemu Tergugat dan Tergugat mengatakan belum mempunyai uang untuk membayarnya;
- Bahwa saksi diperintahkan mengantar surat peringatan ketiga ke tempat Tergugat, namun sampai jatuh tempo Tergugat tidak ada membayar hutangnya, bahkan sampai sekarang ini;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang Ekonomi Syariah sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berdasarkan bukti bertanda P.4 (Surat Perjanjian/Akad Murabahah Nomor 542019110042M, dibuat pada tanggal 29 November 2019) merupakan perjanjian/akad dengan menggunakan prinsip syariah dan tidak mencantumkan klausula arbitrase, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sengketa Ekonomi Syariah dalam bentuk gugatan sederhana harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Tergugat (*vide* Pasal 142 ayat (1) R.Bg), antara Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama (*vide* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana), maka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2022 Christel Lasmana (Penggugat) selaku Direktur

PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Jakarta telah memberikan kuasa kepada Suhan Jagara dan Adek Gupal Putra, Keduanya Karyawan PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Sijunjung beralamat di Jl. Imam Bonjol Jorong Pasar Ilie Pasar Jumat Nagari Muaro Sijunjung, Sumatera Barat, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 saat ini Tergugat berdomisili di wilayah Kecamatan Sijunjung, dimana Kecamatan Sijunjung termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, dimana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, amanat Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Hakim berpendapat upaya perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun, dan ternyata surat gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 Rv. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perikatan berupa Akad Murabahah Nomor 542019110042M, dibuat pada tanggal 29 November 2019, dimana Penggugat telah melakukan pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type ALL NEW SCOOPY STYLISH, No. Rangka MH1JM313XKK078399 No. Mesin JM31E3073106 dan No. Polisi BA 6406 KC,

BPKB atas nama Desmeri, dan Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp.18.755.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 35 (Tiga Puluh Lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp.831.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 02 (Dua) setiap bulannya sampai dengan lunas, selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri, sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya. Namun, sejak tanggal 02 November 2021 Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah, dimana Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukan Gugatan ini, meskipun sudah memberikan 3 (tiga) kali diberikan Surat Peringatan/Somasi. Akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian Rp.18.135.405,- (Delapan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Rupiah). Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini dilaksanakan dengan *verstek* yang dalam praktik Penggugat tidak perlu dibebani pembuktian, akan tetapi untuk menjamin kepastian hukum supaya setelah dijatuhkannya putusan ini tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari, maka Hakim membebani Penggugat untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1 s/d P.5 dan seorang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bukti bertanda P.1 dan P.2, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, meskipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya (*vide* ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara), namun P.1 dan P.2 digunakan untuk mengajukan pembiayaan (*vide* Bukti P.3) dan diperkuat juga dengan keterangan saksi Rayunda Sampurna bin Syamsuddin yang menerangkan bahwa saksi mengantarkan surat peringatan (somasi) ke alamat Tergugat sebagaimana tertera pada bukti P.1 dan P.2, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, P.1 dan P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
2. Bukti bertanda P.3 dan P.4, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat secara partai oleh Penggugat dan Tergugat dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (*incasu* Polda), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegellen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, selain itu Tergugat tidak

mengajukan bukti apapun untuk melumpuhkan bukti P.3 dan P.4 tersebut, maka kekuatan pembuktian P.3 dan P.4 tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

3. Bukti bertanda P.5, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;

Bukti Saksi:

Perihal perihal kedudukan bukti keterangan seorang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal seorang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan keterangan saksi, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perjanjian/ Akad Murabahah dalam pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type BEAT SPORTY CBS, No. Polisi BA 5978 KL, BPKB atas nama Deseri, dan Christel Lasmana (Penggugat) selaku Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Jakarta telah memberikan kuasa khusus tanggal 07 Maret 2022 kepada Suhan Jagara dan Adek Gupal Putra, Keduanya Karyawan PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas, sebagai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kedua Karyawan Perseroan tersebut mempunyai *legal standing* untuk melakukan perbuatan hukum mewakili korporasi di pengadilan. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui prosedur gugatan sederhana telah diatur dalam Pasal 3 *jo.* Pasal 4 *jo.* Pasal 5 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 3 *jo.* Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat setelah mencermati materi gugatan Penggugat tersebut menemukan fakta bahwa baik subjek, objek, prinsip perjanjian maupun petitum perkara yang bersangkutan telah memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan dimaksud sehingga Hakim menyatakan gugatan Penggugat *a quo* dikualifisir sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan perkara *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

1. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) *a quo*, Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat diterima seluruhnya/sebagian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

2. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan tentang apakah Tergugat melakukan cedera janji (wanprestasi) atau tidak, Hakim memandang perlu mengemukakan definisi perikatan/akad, menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) *jo.* Pasal 1313 KUHPerdara

disebutkan bahwa *“akad atau perjanjian didefinisikan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan hukum berupa hak dan kewajiban”*;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 22 *jis.* Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 1320 KUHPerduta, unsur-unsur syahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. sepakat mengikatkan dirinya,
- b. cakap untuk membuat perikatan,
- c. suatu hal tertentu, dan
- d. suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 *jis.* Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerduta tersebut diatas, dihubungkan dengan surat perjanjian/akad murabahah Nomor 542019110042M, dibuat pada tanggal 29 November 2019 (Bukti P.3). Kedua pihak yaitu: Penggugat/PT. Mandala Multifinance, Tbk. yang diwakili oleh Suhan Jagara, selaku Pimpinan Cabang PT.Mandala Multifinance, Tbk, sebagai pemberi fasilitas pembiayaan, dan Tergugat sebagai penerima fasilitas pembiayaan, telah dibuat suatu perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah yang telah ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersedia mengembalikan pembiayaan sebesar Rp.18.755.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan margin keuntungan Penggugat sejumlah Rp.10.406.870,- (sepuluh juta empat ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah Nomor 542019110042M, dibuat pada tanggal 29 November 2019 sebagaimana bukti P.3 antara Penggugat dengan Tergugat adalah kesepakatan sebagai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 1338 KUHPerduta. Oleh

karena itu, akad *a quo* adalah sah menurut hukum dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya, apakah Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi)? Untuk itu, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan cidera janji (wanprestasi), apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam Akad Murabahah tersebut Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp.18.755.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan margin keuntungan sebesar Rp.10.406.870,- (sepuluh juta empat ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), dengan cara diangsur selama 35 (tiga puluh lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp.831.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 02 (Dua) setiap bulannya sampai dengan lunas, selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri, sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah

melunasi seluruh kewajibannya. Namun, sejak tanggal 02 November 2021 Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah, dimana Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* 1238 KUHPerdata dalam kasus cedera janji (*wanprestasi*) harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan, dihubungkan dengan bukti P.5 bahwa sejak 02 November 2021 Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali dan Penggugat telah melakukan peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat agar memenuhi prestasinya dan faktanya Tergugat tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Dengan demikian, Hakim menilai Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) kepada pihak Penggugat;

3. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type ALL NEW SCOOPY STYLISH, No. Rangka MH1JM313XKK078399 No. Mesin JM31E3073106 dan No. Polisi BA 6406 KC, BPKB atas nama Desmeri, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Penggugat, mengenai permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, Hakim telah mempertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.SJJ. tanggal 20 April 2022 *Miladiyah* bertepatan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala keadaan mengenai pertimbangan hukum serta amar putusan sela tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini. Dengan demikian, petitum ketiga Penggugat *a quo* harus dinyatakan ditolak;

4. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp.18.135.405,- (Delapan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Rupiah), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah bukan sejumlah Rp.18.135.405,- (Delapan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Rupiah), namun angsuran pokok sejumlah Rp.10.685.873,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ditambah margin keuntungan sejumlah Rp.2.610.127,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga jumlahnya Rp. Rp.13.296.000,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain pembayaran utang di atas, sesuai Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Tergugat selaku pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan risiko;
- d. Denda; dan/atau;
- e. Membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 denda yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sejumlah Rp.1.890.525,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat sejak tanggal 02 November 2021 terlambat dan atau tidak membayar kewajibannya sesuai kesepakatan dalam akad, setelah dihitung Tergugat memiliki kewajiban membayar denda sejumlah Rp.1.890.525,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). Oleh karena itu,

Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban denda tersebut yang peruntukkan sebagai dana sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sejumlah Rp.15.186.525,- (lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Angsuran Pokok : Rp.10.685.873,-
- b. Margin Keuntungan : Rp. 2.610.127,-
- c. Denda : Rp. 1.890.525,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena nominal yang dituntut oleh Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, maka Hakim menilai petitum *a quo* hanya dikabulkan sebagian;

- 5. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type ALL NEW SCOOPY STYLISH, No. Rangka MH1JM313XKK078399 No. Mesin JM31E3073106 dan No. Polisi BA 6406 KC, BPKB atas nama Desmeri, apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 207 R.Bg ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan, *vide* Pasal 218 R.Bg apabila diperlukan Pengadilan dapat meminta bantuan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) terhadap pihak Penggugat, dan sesuai dengan akad jual beli murabahah objeknya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type ALL NEW

SCOOPY STYLISH, No. Rangka MH1JM313XKK078399 No. Mesin JM31E3073106 dan No. Polisi BA 6406 KC, yang dijadikan jaminan, dan dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4, maka untuk memenuhi rasa keadilan maka Tergugat dihukum untuk mematuhi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap dengan menyerahkan objek tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum *a quo* dapat dikabulkan;

- 6. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type ALL NEW SCOOPY STYLISH, No. Rangka MH1JM313XKK078399 No. Mesin JM31E3073106 dan No. Polisi BA 6406 KC, BPKB atas nama Desmeri, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat perjanjian fidusia, namun disebutkan dalam Pasal 6 Akad bahwa "*Pihak Kedua (Tergugat) berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kembali kepada Pihak Pertama (Penggugat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan guna menjamin pembayaran lebih lanjut maka Pihak Kedua (Tergugat) dengan ini memberi kuasa penuh kepada Pihak Pertama (Penggugat) untuk melakukan penarikan atas kendaraan sesuai dengan spesifikasi tersebut diatas dan/atau melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai akad ini*", meskipun demikian klausul tersebut tidak dapat diberlakukan secara serta merta oleh Tergugat, karena tindakan tersebut adalah tindakan kesewenang-wenangan, mengingat belum adanya kepastian apakah Tergugat telah benar-benar telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dan tidak adanya kepastian mulai kapan objek jaminan tersebut dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa dalam sengketa yang sudah terdapat perjanjian fidusia saja tidak dapat serta merta melakukan eksekusi sendiri objek jaminan, kecuali pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*), sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 6 Januari 2020, *“Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri (baca: pengadilan agama). Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum angka 5 (lima) di atas, ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan, *vide* Pasal 218 R.Bg apabila diperlukan Pengadilan dapat meminta bantuan pihak kepolisian, tatkala Tergugat tidak mau menyerahkan objek jaminan tersebut secara sukarela. Oleh karena itu, petitum *a quo* harus ditolak;

7. **Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type ALL NEW SCOOPY STYLISH, No. Rangka MH1JM313XKK078399 No. Mesin JM31E3073106 dan No. Polisi BA 6406 KC, BPKB atas nama Desmeri, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum angka 6 (enam) di atas, bahwa dalam sengketa yang sudah terdapat perjanjian fidusia saja tidak dapat serta merta melakukan eksekusi sendiri objek jaminan, kecuali pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya "cidera janji" (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*), sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 6 Januari 2020, "*prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri (baca: pengadilan agama). Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 R.Bg selengkapnya adalah: "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri (baca: pengadilan agama) yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari";*

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini objek jaminan berada pada Tergugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek

tersebut kepada Penggugat untuk dijual sendiri atau dilelang dimuka umum melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya guna melunasi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

8. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 660 huruf a Rv. menyebutkan bahwa (1) tuntutan tentang uang paksa (*dwangsom*) harus diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok, (2) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus didasarkan kepada posita yang jelas, (3) besarnya uang paksa (*dwangsom*) tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang, (4) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus dicantumkan secara jelas dan tegas dalam petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan petitum angka 8 (delapan) surat gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat tidak didukung oleh posita yang jelas, yakni yang memuat alasan-alasan hukum diajukannya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) baik berupa hal yang telah diperjanjikan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat, atau juga dengan alasan adanya kekhawatiran Penggugat kepada Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan hukuman pokok sebagaimana yang ditetapkan Hakim secara sukarela. Demikian pula pada petitum angka 8 (delapan) tuntutan *dwangsom* diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang *in casu* pembayaran angsuran pokok, margin dan denda, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 jo Pasal 611 Rv uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa penghukuman dengan instrument hukum uang paksa (*dwangsom*) adalah dimaksudkan hanya untuk dan terhadap putusan Pengadilan yang menghukum para pihak untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan, *dwangsom* tidak dapat dikenakan untuk dan terhadap pembayaran sejumlah uang dan atau tuntutan kebendaan lainnya, hal ini karena untuk hal itu dapat dilakukan upaya hukum lainnya baik dengan cara eksekusi riil, penyitaan atau pelelangan. Dengan demikian, Hakim berpendapat uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diberlakukan untuk dan terhadap perkara *a quo*. Oleh karena itu, petitum *a quo* harus dinyatakan ditolak;

- 9. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 (1) RBg dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1975 *jis.* SEMA Nomor 3 Tahun 1978, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001, yaitu: menentukan adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa selain itu, petitum angka 9 (sembilan) surat gugatan Penggugat ini juga tidak didukung oleh posita yang jelas, yakni yang memuat alasan-alasan hukum diajukannya putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*). Oleh karena itu, petitum *a quo* harus dinyatakan ditolak;

- 10. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam bidang perkara perdata, bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam suatu perkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk itu karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan. Oleh karena itu, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primer telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian Penggugat sejumlah Rp.15.186.525,- (lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Angsuran Pokok sejumlah Rp.10.685.873,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - 4.2. Margin keuntungan sejumlah Rp.2.610.127,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah)
 - 4.3. Denda sejumlah Rp.1.890.525,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek jaminan, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Honda, type ALL NEW SCOOPY STYLISH, No. Rangka MH1JM313XKK078399 No. Mesin JM31E3073106 dan No. Polisi BA 6406 KC, BPKB atas nama Desmeri kepada Penggugat untuk dijual Penggugat guna membayar kerugian Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sijunjung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhamad Imran, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, tanpa kehadiran Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TTD.

TTD.

Muhamad Imran, S.H.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp. 30.000,-
 - b. Panggilan Pertama Rp. 20.000,-
 - c. Redaksi Rp. 10.000,-
 - d. PBT isi Putusan Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 300.000,-
4. PBT isi Putusan Rp. 100.000,-

5. Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	530.000,-
<hr/>		
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)		